

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta. Sentra Press.
- Chazawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. Alumni Press.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Mendesain pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PPU-04/2006)*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan pemecahannya)*, Jakarta. Gramedia.
- Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika,
- Mansur, Didik Arief, 2011, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta. Media Press.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya. ITS Press.
- Prayudi, Guse, 2008, *Tips dan Trik Yuridis Menjadi Saksi Perkara Pidana*, Yogyakarta. Pustaka Pena.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka.
- Sasangka, Hari, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, Bandung. Manadar Maju.
- Widowaty, Yeni, 2011, *Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*, Semarang. UNDIP Press.

Daftar Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (undang-undang Nomor 1 Tahun 1946).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
- Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 tentang Perlindungan terhadap saksi ahli dan ketentuan pidana, serta penguatan kewenangan dan kelembagaan LPS.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2011 tentang Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Perlindungan terhadap *Whistleblower*.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU VIII/2010 tentang Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka/ Terdakwa.

Makalah

Artidjo Alkostar, "Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime", Makalah disampaikan dalam Ceramah Umum Pelatihan Hakim dan Hakim ad hoc Tipikor, di Diklat

Abdul Haris Semendawai, "Pengaruhutamaan Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan di Indonesia" Makalah disampaikan dalam Seminar Umum LPSK, Aparat Penegak Hukum dan Praktisi, Akademisi, Rekan-rekan Media di Hotel Santika Premiere, Sabtu 26 Mei 2012.

Hendry Yosodiningrat, "Perlindungan Saksi dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", (Yogyakarta: Hotel Santika Premiere), 26 Mei 2012.

Artikel Internet (website)

Whistle Blower", diakses pada 10 Maret 2012,07:00.<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/413285>

Saksi Whistle Blower; Ayo ramai-ramai menjadi Whistle Blower", http://www.bbc.co.uk/Indonesiaberita_indonesia/2011/07/110719_perlindungan_saksi.shtml

<http://www.phylopop.com/2012/04/18-modus-operandi-korupsi.html>

LPSK Dukung Terbitnya SEMA Perlindungan *Whistle Blower*", diunduh di <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/413285> diakses tanggal 23 Maret 2012

"Susno Duadji Menggugat Pasal Whistleblower"

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e7713efa41da/sema-whistleblower-bukan-kebijakan-pembebasan-hukuman>

Koalisi Perlindungan Saksi, *Catatan Kritis terhadap UU NO. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, diunduh dari rakernas.mahkamahagung.go.id/seputar.../ebook/.../searchtext.xml

Perilaku Kontraproduktif (Contraproductive Behavior) diunduh dari <https://adilkurnia.wordpress.com/tag/faktor-faktor-perilaku-korupsi/>

Memahami modus operandi Tindak Pidana Korupsi" diunduh dari <http://leinadunam.blogspot.com/2010/05/memahami-korupsi-dan-modus-operandinya.html>

<http://www.phylonop.com/2012/04/18-modus-operandi-korupsi.html>

“Whistleblower Bisa Bebas dari Tuntutan Hukum” diunduh di
<http://www.djpp.depkmham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1136-whistleblower-bisa-bebas-dari-tuntutan-hukum.html>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/constitutional-law/2027068-prinsip-penegakkan-hukum/>

id.berita.yahoo.com/kuntoro-minta-presiden-perpanjang-masa-kerja

www.republika.co.id › *Nasional* › *Hukum*